

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perlindungan korban *Revenge porn* dengan perbedaan hukum yang ada di Indonesia dan Australia, *Revenge porn* diartikan penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan individu yang bersangkutan. *Revenge porn* adalah tindak pidana yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara menyeluruh perlindungan hukum yang tersedia bagi korban *Revenge porn* dan untuk menganalisis kerangka kerja legislatif mendasar yang mengatur *Revenge porn* di dua negara, bersama dengan peran otoritas penegak hukum dalam melindungi para korban. Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif dengan menggunakan metodologi legislatif dan komparatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki banyak undang-undang yang mengatur kejahatan ini, termasuk UU TPKS, UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP, namun perlindungan bagi korban masih dianggap kurang spesifik karena di dalamnya tidak membahas tentang pornografi balas dendam, sementara itu di Australia telah menerapkan Undang-Undang yang spesifik, seperti *Criminal Code Act 1995* (KUHP) dan *Enhancing Online Safety* yang memberikan dukungan lebih baik bagi korban. Kesimpulan dari penelitian ini untuk memperbaiki regulasi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran Masyarakat tentang dampak negative *Revenge porn* guna melindungi hak korban atau individu.

Kata kunci: *Revenge porn*, perlindungan hukum Indonesia dan Australia, keadilan

ABSTRACT

This study aims to analyze the protection of victims of *Revenge porn* with differences in existing laws in Indonesia and Australia, *Revenge porn* is defined as the distribution of intimate images or videos without the consent of the individual concerned. *Revenge porn* is a criminal offense that is growing along with the advancement of information technology. This research aims to thoroughly investigate the legal protection available to victims of *Revenge porn* and to analyze the underlying legislative framework governing *Revenge porn* in the two countries, along with the role of law enforcement authorities in protecting victims. This research employs normative legal analysis using legislative and comparative methodologies. The findings of this research show that Indonesia has many laws regulating this crime, including the TPKS Law, ITE Law, Pornography Law, and *Criminal Code*, but the protection for victims is still considered lacking in specificity as it does not address *Revenge porn*, while Australia has implemented specific laws, such as the *Criminal Code Act 1995* (KUHP) and *Enhancing Online Safety* which provide better support for victims. The conclusion of this research is to improve regulations in Indonesia and increase public awareness about the negative impact of *Revenge porn* in order to protect the rights of victims or individuals.

Keywords: *Revenge porn*, legal protection in Indonesia and Australia, justice

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Penelitian Terdahulu	16
1.6 Metode Penelitian	22
1.6.1 Jenis Penelitian	22
1.6.2 Pendekatan Penelitian	22
1.6.3 Bahan Hukum	23
1.7 Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	27
2.1 Pengertian Viktimologi dan Kriminologi	27
2.2 Pengertian Korban	30
2.3 Dampak <i>Revenge porn</i> Bagi Korban	32
2.4 Pengertian <i>Revenge porn</i>	33
2.5 Bentuk-Bentuk Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana <i>Revenge porn</i>	35
2.6 Bentuk Perlindungan Korban	39

2.7	Perlindungan Hukum Dan Lembaga Penegakkan Hukum Di Indonesia Dan Australia	42
BAB III PEMBAHASAN		47
3.1	Regulasi Perlindungan Hukum Korban Pelaporan <i>Revenge Porn</i> Dalam Mewujudkan Keadilan Di Indonesia Dan Australia	47
3.1.1	Regulasi Hukum Di Indonesia.....	47
3.1.2	Regulasi Hukum di Australia	85
3.2	Peran Lembaga Penegak Hukum Terhadap Korban <i>Revenge Porn</i> di Indonesia dan Australia?.....	116
3.2.1	Lembaga Penegak Hukum Di Indonesia.....	116
3.2.2	Lembaga Penegak Hukum Di Australia.....	126
BAB IV PENUTUP		133
4.1	Kesimpulan.....	133
4.2	Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA.....		135

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian Terdahulu	16
Tabel 3 1	Penegakkan Hukum Revenge Porn Di Indonesia Dan Australia.....	101
Tabel 3 2	Regulasi Perbedaan Pengaturan Hukum di Indonesia dan Australia	111